

**PENURUNAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN
GUBERNUR RIAU TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA
(Studi di Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Kulim)**

By : Nurdiana
rusdinurdiana@gmail.com
Supervisor: Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Library of Riau University

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Enacting Undang-Undang No. 32 tahun 2004 to the beginning of the implementation of local elections. On September 4th 2013 gubernatorial election held of Riau that have five pairs of candidates. However, in the first round of voting no one candidate won the election, so that the second round of the election held on November 27th 2013, which was have two pairs of candidates who have the most votes in the first round. In the second round, the level of public participation is lower than the first round. Data showed an increase in the number of voters who abstain from voting or non-voting highest in Tenayan Raya highway with the number increased is 7,79%. Recapitulation's data of vote counting in the district Tenayan Raya, taken two villages that showed the highest increase in non-voting and non voting lowest increase, the villages are Rejosari and Kulim.

This research is a field research by combining quantitative and qualitative approaches, where all the symptoms observed, measured and realized in numbers and analyzed in descriptively. The result showed sociological factors, psychological, and rasional are factors that affect the decline in voter participation. At Rejosari village, rational factor is the factor most affecting of non-voting as many as 68,67%. Whereas psychological factors are the factor that most influence on the Kulim village, as many as 75,33%.

Keyword: *Non Voting, Voters Participation, Gubernatorial Elections*

1. PENDAHULUAN

Mulai tanggal 1 Juni 2005, Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota) dipilih secara langsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada tahun 2013, provinsi Riau melaksanakan pesta Pilkada dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau untuk masa jabatan 2013-2018. Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tersebut berlangsung dua putaran. Pilgubri putaran pertama berlangsung pada tanggal 03 September 2013 dengan lima kandidat pasangan calon yaitu: Herman Abdullah-Agus Widayat, Anas Maamun-Arsyad Juliandi Rahman, Lukman Edi-Suryadi Khusaini, Achmad-Masrul Kasmy, Jon Erizal-Mambang Mit.

Pada Pilgubri putaran pertama tersebut, tidak ada kandidat yang memenuhi target untuk terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018. Maka, diadakan Pemilihan putaran kedua pada tanggal 27 November 2013 dengan kandidat dua pasangan calon yang memiliki suara terbanyak, yakni pasangan Herman

Abdullah-Agus Widayat dan pasangan Anas Maamun-Arsyad Juliandi Rahman. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah tetap terjadi pada Pilgubri putaran kedua. Tingkat partisipasi tersebut bahkan menurun dari putaran pertama.

Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau dengan kondisi yang lebih maju dibanding kabupaten kota lainnya terutama dibidang pendidikan dengan fasilitas dan kualitas yang baik sekaligus menjadi salah satu indikator partisipasi politik seharusnya bisa mendorong partisipasi politik di kota Pekanbaru. Namun, pada kenyataannya tingkat masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya atau yang dalam penelitian ini disebut sebagai *non voting* di kota Pekanbaru masih terbilang tinggi.

Jumlah DPT Pekanbaru adalah 587.479. Berdasarkan data yang ada, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 276.485 yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. Jumlah suara sah adalah 271.913 suara. Jumlah suara tidak sah adalah 4.572 suara. Sedangkan jumlah *non voting* yang 52,94 % adalah sebanyak 314.945 suara.

Secara umum, perhitungan dan peningkatan *non voting* di Pekanbaru dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perhitungan dan Peningkatan *Non Voting* di Pekanbaru

No	Kecamatan	Peningkatan <i>Non Voting</i> (%)
1	Tampan	7,1
2	Tenayan Raya	7,79
3	Marpoyan Damai	6,98
4	Payung Sekaki	5,78
5	Bukit Raya	7,05
6	Rumbai Pesisir	6,42
7	Sukajadi	5,65
8	Rumbai	7,51
9	Lima Puluh	5,24
10	Senapelan	5,79
11	Pekanbaru Kota	5,9
12	Sail	7,1

Sumber: KPU Kota Pekanbaru Tahun 2013

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa kecamatan Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan peningkatan *non voting* tertinggi, yaitu sebanyak 7,79 %.

Data rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan Tenayan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Perhitungan dan Peningkatan *Non Voting* di Kecamatan Tenayan Raya

No	Kelurahan	DPT	Peningkatan <i>Non Voting</i> (%)
1	Rejosari	23.530	8,08
2	Sail	25.028	7,68
3	Tangkerang Timur	19.307	7,55
4	Kulim	15.317	7,09

Sumber: KPU Kota Pekanbaru Tahun 2013

Dari data di atas, kelurahan Rejosari merupakan kelurahan dengan peningkatan *non voting* tertinggi yaitu sebanyak 8,08 %. Sedangkan kelurahan dengan persentase peningkatan *non voting* terendah berada di kelurahan Kulim yaitu sebanyak 7,09 %.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian sehubungan dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Tenayan Raya dengan judul: ***“Penurunan Tingkat Partisipasi Pemilih di Kecamatan Tenayan Raya pada Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013 Putaran Kedua (Studi di Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Kulim)”***.

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgubri tahun 2013 pada putaran kedua di kecamatan Tenayan Raya khususnya di kelurahan Rejosari dan kelurahan Kulim mengalami penurunan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgubri tersebut?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisa Penurunan Partisipasi Pemilih

Salah satu cara untuk melihat tingkat partisipasi pemilih adalah dengan melihat jumlah pemberian suara. Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi aktif yang paling mudah dilihat. Pada Pilgubri tahun

2013, pemberian suara mengalami penurunan pada putaran pertama menuju putaran kedua. Pada putaran pertama, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berjumlah sekitar 61,31 % dari jumlah DPT. Sedangkan pada putaran kedua tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 53,03 % dari jumlah DPT yang ada. Pemilih yang aktif menggunakan hak pilihnya dalam Pilgubri putaran kedua pada Rabu 27 November 2013 hanya 46,97 % atau sekitar 1.879.015 jiwa dari total DPT yang berjumlah 4.000.459 jiwa.

Berdasarkan media online, Pekanbaru Ekspres tanggal 29 November 2013, penurunan tingkat partisipasi pemilih yang terjadi di 12 kabupaten/kota di Riau berjumlah (dalam persen), yaitu:

- Pekanbaru menggunakan hak pilih sebesar 47,06 %
- Dumai menggunakan hak pilih sebesar 54,33 %
- Kampar menggunakan hak pilih sebesar 45,21 %
- Indragiri Hulu menggunakan hak pilih sebesar 69,03 %
- Indragiri Hilir menggunakan hak pilih sebesar 47,35 %
- Bengkalis menggunakan hak pilih sebesar 51,19 %
- Pelalawan menggunakan hak pilih sebesar 49,19 %
- Rokan Hulu menggunakan hak pilih sebesar 25,63 %
- Rokan Hilir menggunakan hak pilih sebesar 28,89 %
- Siak menggunakan hak pilih sebesar 61,65 %
- Kuantan Singingi menggunakan hak pilih sebesar 45,10 %

- Kepulauan Meranti menggunakan hak pilih sebesar 42,40 %

Hasil persentase penggunaan hak pilih pada masing-masing kabupaten dan kota diatas menggambarkan tingginya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilgubri tahun 2013. Menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilgubri tahun 2013 menunjukkan semakin lemahnya tatanan demokrasi di daerah. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara dan daerah. Masyarakat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi berdasar pada lagika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau juga mengalami penurunan partisipasi pemilih yang cukup tinggi pada Pilgubri tahun 2013. Dari data yang ada, jelas terlihat bahwa semua kecamatan di Pekanbaru mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih, dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah *non voting* dari putaran pertama ke putaran kedua. Peningkatan *non voting* tertinggi terjadi di kecamatan Tenayan Raya, yakni sebanyak 7,79 %.

Partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dapat diukur dari latar belakang pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, agama dan usia secara umum terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut karena faktor ekonomi maupun kepentingan dari individu. Menurut Surbakti (dalam Bawono, 2008), kesadaran politik

merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Di kelurahan Rejosari, partisipasi masyarakat mengalami penurunan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan rasa apatis masyarakat yang tinggi. Dari jumlah *non voting* sebesar 10.908 suara pada pemilihan putaran pertama, meningkat menjadi 12.808 suara pada putaran kedua.

Di kelurahan Kulim, peningkatan jumlah *non voting* dipengaruhi oleh rasa jenuh karena banyaknya pemilihan yang berlangsung. Rasa jenuh membuat masyarakat pada akhirnya memilih untuk melakukan aktivitas lain pada saat berlangsungnya pemilihan. Kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat yang berbeda menimbulkan perbedaan pemahaman pula terhadap pentingnya pemberian hak pilih dalam pemilu. Masyarakat yang menganggap pemilu tidak begitu penting akan memilih untuk melakukan kegiatan lain pada hari berlangsungnya pemilihan.

Chappel dan Veiga (dalam Lestari, 2009) menyatakan penilaian tentang '*policy-problem-solving*' bisa dilakukan secara '*ex-post*' dan '*ax-ante*'. Penilaian *ex-pos* berarti menilai apa saja yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau pemimpin yang berkuasa untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sementara *ex-ante* dilakukan dengan cara mengukur dan menilai kemungkinan program kerja

dan solusi yang ditawarkan sebuah partai ketika diterapkan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Reputasi masa lalu kontestan dan pengaruh pemimpin kharismatik dari kontestan berkontribusi pada kesan serius dan program kerja yang ditawarkan. Masyarakat memiliki keterbatasan dalam menganalisis apakah program kerja yang ditawarkan benar-benar dapat menjawab permasalahan yang ada atau tidak.

Dari hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa persentase alasan tertinggi masyarakat kelurahan Rejosari tidak memilih pada putaran kedua adalah "Harus Bekerja" (38%). Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat merasa bahwa memberikan hak pilih tidak lebih penting daripada bekerja sehingga masyarakat lebih memilih untuk tetap bekerja daripada datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya. Sikap lebih memilih untuk tetap bekerja juga berarti bahwa masyarakat tidak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kandidat sehingga masyarakat merasa tidak perlu meluangkan waktu untuk memberikan hak pilih. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kandidat yang ada menyebabkan masyarakat cenderung bersikap apatis. Rasa tidak mau tahu terhadap hasil pemilihan membuat pemilih enggan memberikan hak pilih.

Sementara itu, sebanyak 48% masyarakat kelurahan Kulim tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua dikarenakan kandidat yang mereka pilih pada putaran pertama tidak lolos pada putaran kedua. Sedangkan tingkat

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu hanya 10%. Artinya, masyarakat di kelurahan Kulim termasuk pemilih yang rasional. Ketika mereka melihat bahwa kandidat yang melaju dalam pemilihan tidak sesuai dengan yang mereka kehendaki, akan sulit untuk mendapatkan suara mereka dalam pemilihan tersebut.

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku *Non Voting*

a. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkritnya, pilihan seseorang dalam pemilihan dipengaruhi latar belakang sosial, seperti agama, suku, dan asal daerah.

Agama tidak menjadi salah satu alasan yang signifikan dalam membuat masyarakat kelurahan Rejosari yang *non voting* untuk tidak memberikan hak pilihnya. Hal ini disebabkan karena kandidat yang lolos ke putaran kedua semuanya beragama Islam dan pemilih di kelurahan Rejosari sendiri juga mayoritas beragama Islam. Artinya, alasan mereka *non voting* tidaklah berasal dari isu agama, melainkan karena alasan lain. Senada dengan jawaban yang diberikan masyarakat di kelurahan Rejosari, masyarakat di kelurahan Kulim juga memberikan pandangan bahwa isu agama tidak begitu memberikan pengaruh. Angka yang cukup tinggi, yakni 80% responden ketika memutuskan untuk tidak memilih pada putaran kedua menyatakan bahwa keputusan mereka tidak memilih tidak didasari pada isu-isu agama.

Sebanyak 82% responden di kelurahan Rejosari menjawab bahwa asal daerah memberikan pengaruh kepada mereka untuk tidak memberikan lagi hak pilihnya pada putaran kedua. Hanya 18% responden yang melakukan *non voting* tidak dipengaruhi oleh asal daerah dari kandidat yang ada. Hal ini berarti ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat dari daerah tertentu yang membuat masyarakat menjadi *non voting*. Sama halnya dengan masyarakat di kelurahan Rejosari, masyarakat di kelurahan Kulim juga memandang asal daerah sebagai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat yang menganggap bahwa asal daerah kandidat memberikan pengaruh kepada mereka untuk bersikap *non voting* berjumlah 74%. Sedangkan yang memutuskan *non voting* tanpa mempertimbangkan asal daerah hanya 26% saja.

Suku dari kandidat hanya memiliki pengaruh sebesar 12% kepada pemilih di kelurahan Rejosari dalam menentukan pilihannya. Sedangkan masyarakat yang tidak terpengaruh dengan suku kandidat sebanyak 88%. Sedangkan sebagian besar masyarakat kelurahan Kulim menjadikan suku dari kandidat sebagai pertimbangan bagi mereka untuk tidak memilih. Faktor sosiologis dapat menjelaskan bahwa kecenderungan orang akan memilih kandidat yang mempunyai kesamaan suku/ras dengan pemilih.

b. Faktor Psikologis

Sementara itu faktor psikologis digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan berupa identifikasi kandidat. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas kandidat-kandidat yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap kandidat tertentu. Pilihan masyarakat untuk melakukan *non voting* dipengaruhi oleh adanya isu-isu politik selama masa kampanye, kepercayaan kepada kandidat, dan kepercayaan terhadap partai politik pengusung kandidat.

Sebesar 56 % responden di kelurahan Rejosari percaya terhadap isu-isu politik yang berkembang selama masa kampanye dan memberikan pengaruh terhadap *non voting*. Sedangkan pada kelurahan Kulim, isu politik selama masa kampanye mempengaruhi *non voting* kepada 68 % responden.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat yang bersaing memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap perilaku *non voting*. Sebanyak 72 % responden di kelurahan Rejosari menjawab kepercayaan kepada kandidat memberikan pengaruh, dan sebanyak 82 % responden kelurahan Kulim juga menjawab bahwa ada pengaruh kepercayaan kepada kandidat terhadap keputusan untuk *non voting*. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kandidat, artinya masyarakat tidak percaya bahwa kandidat yang ada dapat

memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sebanyak 64% masyarakat kelurahan Rejosari menganggap bahwa rendahnya kepercayaan kepada partai politik memberikan pengaruh untuk *non voting*, artinya masyarakat tidak percaya bahwa partai politik pengusung kandidat dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sedangkan pada kelurahan Kulim, jumlah persentase masyarakat yang tidak percaya pada partai politik pengusung kandidat lebih besar jumlah persentasenya dibanding kelurahan Rejosari, yaitu sebesar 76 %. Artinya, masyarakat di kedua kelurahan ini memiliki tingkat kepercayaan yang rendah kepada partai politik pengusung kandidat pada Pilgubri tahun 2013 putaran kedua, hal ini mempengaruhi masyarakat sehingga meningkatkan jumlah *non voting*.

c. Faktor Rasional

Faktor rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Ada tiga hal yang dinilai mempengaruhi masyarakat melakukan *non voting* pada faktor rasional ini, yaitu: visi dan misi yang ditawarkan kandidat, keuntungan yang didapat selama masa kampanye, dan kepemimpinan kandidat pada jabatan politik sebelumnya.

Sebanyak 78% masyarakat *non voting* di kelurahan Rejosari pada putaran kedua dipengaruhi oleh visi dan misi kandidat. Sementara itu di kelurahan Kulim, salah satu alasan

masyarakat kelurahan Kulim melakukan *non voting* adalah ketidaksesuaian visi dan misi (42%) yang diberikan kandidat. Sebagian lainnya (58%) merasa visi dan misi tidak mempengaruhi mereka dalam memutuskan untuk tidak memilih.

Selanjutnya, sebesar 68 % masyarakat di kelurahan Rejosari merasa tidak mendapat keuntungan pada masa kampanye. Sedangkan pada masyarakat kelurahan Kulim, persentase tidak mendapat keuntungan pada masa kampanye lebih besar jumlahnya, yakni sebanyak 74 %. Pertimbangan untung rugi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya *non voting* pada putaran kedua Pilgubri tahun 2013 di kelurahan Rejosari dan kelurahan Kulim.

Adanya pengaruh kepemimpinan kandidat pada jabatan politik sebelumnya terhadap pilihan masyarakat dalam melakukan *non voting*. Dapat dilihat bahwa sebanyak 60 % masyarakat kelurahan Rejosari terpengaruh oleh hal tersebut, dan sebanyak 64 % masyarakat kelurahan Kulim juga menunjukkan hasil yang senada.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Masyarakat di kecamatan Tenayan Raya memutuskan untuk *non voting*

pada putaran kedua karena alasan pekerjaan dan kandidat yang dipilih pada putaran pertama tidak lolos menuju putaran kedua. Mayoritas masyarakat kelurahan Rejosari memutuskan untuk tidak memilih pada putaran kedua karena alasan pekerjaan atau lebih memilih untuk tetap bekerja pada saat dilangsungkannya pemilihan. Sedangkan masyarakat kelurahan Kulim memutuskan untuk memilih pada putaran kedua dikarenakan kandidat yang dipilih pada putaran pertama tidak lolos pada pemilihan putaran kedua.

2. Faktor sosiologis, psikologis, dan rasional merupakan faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi pemilih di kecamatan Tenayan Raya pada Pilgubri tahun 2013 putaran kedua. Faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor psikologis dan faktor rasional. Pada kelurahan Rejosari, faktor rasional merupakan faktor yang paling mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi pemilih, yaitu sebanyak 68, 67 %. sedangkan faktor psikologis merupakan faktor yang paling mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi pemilih pada kelurahan Kulim, yaitu sebanyak 75, 33 %.

4.2. Saran

Setelah melakukan penelitian di kelurahan Rejosari dan kelurahan Kulim untuk melihat faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih atau alasan masyarakat

untuk tidak memberikan hak pilihnya pada Pilgubri tahun 2013 putaran kedua, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan supaya ada penelitian serupa yang bermaksud menguji statistik di kecamatan Tenayan Raya. Selain itu direkomendasikan juga untuk penelitian tentang bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dari latarbelakang sosiokultural yang berbeda.
2. Pemerintah daerah hendaklah menerapkan kebijakan yang lebih memihak kepada masyarakat agar masyarakat juga antusias dalam berpartisipasi politik maupun dalam pembangunan daerah dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam berpartisipasi politik terutama dalam pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat karena partisipasi masyarakat juga menentukan kebijakan yang diterapkan kepala daerah maupun wakil rakyat terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia. 2009. *Bagaimana Merancang dan Membuat Survei Opini Publik*. Jakarta: AROPI
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2008. *Pedoman Penulisan dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip Unri*. Pekanbaru: UR Press.
- Hetifah Sj Sumarto. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mochtar Mas'ood, Colin MacAndrews. 2001. *Perbandingan sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ramlani Lina Sinaulan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Zipp Books
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Karya Tulis Ilmiah:**
- Achmad Riyanto. 2010. *Konsep Demokrasi di Indonesia dalam Pemikiran Akbar Tandjung dan A. Muhaimin Iskandar*. Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Atiek Lestari. 2009. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Bismar Arianto. 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No. 1
- Fera Hariani Nasution. 2009. *Perilaku Pemilih pada Pemilihan Gubernur*

- Sumatera Utara Secara Langsung di Kabupaten Labuhan Batu. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Hastomo. 2006. *Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Dari Tahun 1945-Sekarang*. Politeknik Kesehatan. Yogyakarta
- Marlini Tarigan. 2009. *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Muhammad Bawono. 2008. *Persepsi Dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 Di Kabupaten Nganjuk*. M'Power Vol. 8, No. 8
- Mulyawarman. 2007. *Perilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Pekanbaru
- Remon. 2011. *Partisipasi Mahasiswa pada Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Riau Tahun 2009*. Universitas Riau. Pekanbaru
- Tri Setya Puspasari. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang
- <http://anindya-intan-ardanari.blogspot.com/2012/04/landasandasar-hukum-pelaksanaan-pilkada.html>(diakses tanggal 22 Desember 2013)
- <http://duniabembi.blogspot.com/2013/09/partisipasi-politik-masyarakat-dalam.html> (diakses tanggal 22 Desember 2013)
- <http://makmureffendi.wordpress.com/2013/04/14/motivator-partisipasi-masyarakat-mengikuti-pemilu-2014/> (diakses tanggal 10 Januari 2014)
- <http://munasyaroh.blogspot.com/2010/12/arti-pentingnya-pilkada.html> (diakses tanggal 10 Januari 2014)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Sumber Lain: